

Hubungan Penguasa dan Pengusaha (Kajian Sosiologi Politik dan Demokrasi)

Ansela Raintung¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: 120606040@unima.ac.id, 2romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025
 Accepted March 25, 2025
 Published May 30, 2025

Keywords:

Hubungan,
 Penguasa,
 Pengusaha,
 Sosiologi Politik,
 Demokrasi



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara penguasa dan pengusaha dalam konteks sosiologi politik dan demokrasi masyarakat di Desa Lompad, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kelurahan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, penelitian ini mengeksplorasi pola hubungan kekuasaan antara elite politik dan ekonomi serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tiga narasumber kunci yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung tentang dinamika politik lokal, yaitu mantan Hukum Tua Desa Lompad, tokoh masyarakat, dan pengusaha yang terlibat dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal ekonomi merupakan prasyarat fundamental untuk memasuki arena politik lokal, di mana calon pemimpin memerlukan dukungan finansial besar untuk kampanye. Ditemukan pula hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha, di mana politisi mendapat dukungan dana sementara pengusaha memperoleh akses istimewa terhadap kebijakan dan proyek pemerintah. Lebih lanjut, pengusaha menggunakan politik sebagai strategi perluasan bisnis dan akumulasi modal simbolik untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Fenomena ini mencerminkan komodifikasi politik dan privatisasi kepentingan publik yang melemahkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan politik, akuntabilitas, dan partisipasi inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan penguasa-pengusaha telah menciptakan oligarki lokal yang merugikan kepentingan publik dan memerlukan reformasi sistemik untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Abstract

This study aims to examine the relationship between rulers and businesspeople in the context of political sociology and community democracy in Lompad Village, South Minahasa Regency, and Taratara Village, West Tomohon District. Using a qualitative approach with in-depth interviews, this study explores the patterns of power relations between political and economic elites and their impact on the quality of local democracy. Data were collected through interviews with three key informants with direct experience and knowledge of local political dynamics: the former Head of Lompad Village, community leaders, and businesspeople involved in politics. The results indicate that economic capital is a fundamental prerequisite for entering the local political arena, where prospective leaders require substantial financial support for their campaigns. A symbiotic relationship between rulers and businesspeople was also found, where politicians receive financial support while businesspeople gain privileged access to government policies and projects. Furthermore, businesspeople use politics as a strategy for business expansion and the accumulation of symbolic capital to enhance business credibility. This phenomenon reflects the commodification of politics and the privatization of public interests, which undermine democratic principles such as

political equality, accountability, and inclusive participation. This study concludes that the relationship between rulers and entrepreneurs has created a local oligarchy that is detrimental to public interests and requires systemic reform to improve the quality of local democracy.

Keywords: Relationships, Rulers, Entrepreneurs, Political Sociology, Democracy

A. Pendahuluan

Hubungan antara penguasa dan pengusaha merupakan fenomena klasik dalam kajian sosiologi politik yang terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam konteks masyarakat desa, relasi ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan jaringan kekuasaan lokal yang kental dengan nuansa patron-klien, di mana elit politik dan ekonomi saling bergantung untuk mempertahankan dominasi mereka (Robison & Hadiz, 2004). Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat lokal tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ideal, melainkan diwarnai oleh praktik-praktik kolusif yang melibatkan pertukaran kepentingan antara pemegang kekuasaan politik dengan para pelaku ekonomi. Desa Lompad di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kelurahan Taratara di Kecamatan Tomohon Barat menjadi lokus menarik untuk mengkaji fenomena ini, mengingat kedua wilayah tersebut memiliki dinamika politik lokal dan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan dalam konteks pembangunan daerah.

Dalam perspektif sosiologi politik, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan (Lukes, 2005). Pengusaha lokal di desa dan kelurahan seringkali menjadi aktor penting dalam politik elektoral karena mereka memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dimobilisasi untuk mendukung kampanye kandidat tertentu (Aspinall & Berenschot, 2019). Sebaliknya, penguasa atau elit politik lokal memberikan akses istimewa kepada pengusaha dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan, proyek-proyek pemerintah, atau perlindungan terhadap persaingan usaha. Pola hubungan semacam ini menciptakan oligarki lokal yang dapat menghambat partisipasi politik masyarakat luas dan merusak kualitas demokrasi (Winters, 2011). Di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Minahasa dan Tomohon, pola hubungan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural seperti sistem kekerabatan dan solidaritas berbasis komunitas yang masih kuat.

Demokrasi di tingkat desa dan kelurahan seharusnya memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, namun dalam realitasnya, kekuasaan politik dan ekonomi seringkali terkonsentrasi pada segelintir elit (Nordholt & van Klinken, 2007). Penelitian tentang hubungan penguasa dan pengusaha di masyarakat desa menjadi penting untuk memahami bagaimana praktik-praktik kekuasaan ini berlangsung, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons dominasi elit tersebut. Studi di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme hubungan penguasa-pengusaha dalam konteks lokal, serta mengungkap sejauh mana praktik demokrasi deliberatif dapat berjalan di tengah kuatnya jaringan patronase yang ada. Kajian ini juga relevan dalam konteks implementasi Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintahan desa, namun di sisi lain berpotensi memperkuat oligarki lokal jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat yang efektif (Antlöv et al., 2016).

Beberapa penelitian telah mengkaji hubungan antara elit politik dan pengusaha dalam konteks politik lokal di Indonesia. Hadiz (2010) dalam studinya tentang lokalisme kekuasaan di Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa desentralisasi justru memperkuat praktik-praktik predatori di tingkat lokal, di mana jaringan patron-klien antara birokrat, politisi, dan

pengusaha semakin mengakar. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekuatan oligarki lokal mampu mengadaptasi diri dengan sistem demokrasi formal sambil tetap mempertahankan dominasi mereka melalui kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Aspinall dan Berenschot (2019) dalam kajian komprehensif mereka tentang politik uang dalam demokrasi Indonesia menjelaskan bagaimana broker politik memainkan peran krusial dalam menghubungkan pengusaha dengan pemilih, menciptakan sistem transaksional yang melemahkan akuntabilitas demokratis. Studi-studi ini memberikan kerangka teoritis yang kuat tentang bagaimana hubungan penguasa dan pengusaha beroperasi dalam sistem politik Indonesia kontemporer, namun sebagian besar fokus pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi, dengan perhatian yang terbatas pada dinamika di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Vel dan Bedner (2015) menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia menciptakan ruang bagi munculnya elit-elit baru di tingkat desa yang memanfaatkan sumber daya dana desa untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun regulasi bertujuan memperkuat demokrasi desa, dalam praktiknya seringkali terjadi penguasaan sumber daya oleh kelompok elit yang memiliki koneksi dengan pemerintah dan dunia usaha. Törnquist et al. (2009) dalam studi mereka tentang demokrasi lokal di Indonesia juga menekankan pentingnya memahami konteks sosial-budaya dalam menganalisis praktik demokrasi, termasuk bagaimana nilai-nilai lokal dan jaringan sosial mempengaruhi dinamika politik. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting tentang politik lokal dan hubungan elit-massa, belum ada kajian yang secara spesifik mengeksplorasi pola hubungan penguasa-pengusaha di komunitas desa dan kelurahan dengan mempertimbangkan dimensi sosiologis, politik, dan demokratis secara terintegrasi, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas.

Meskipun telah banyak kajian tentang hubungan elit politik dan ekonomi di Indonesia, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami dinamika hubungan penguasa dan pengusaha pada tingkat mikro, yaitu di level desa dan kelurahan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis struktural dan makro tentang oligarki dan politik uang, namun kurang memberikan perhatian pada mekanisme konkret bagaimana hubungan ini dibangun, dipelihara, dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Lebih lanjut, penelitian yang ada cenderung menggunakan pendekatan ekonomi politik yang menekankan aspek material dan transaksional, sementara dimensi sosial-budaya seperti sistem nilai, norma lokal, dan jaringan sosial yang membentuk dan melegitimasi hubungan penguasa-pengusaha belum banyak dieksplorasi. Dalam konteks Sulawesi Utara, khususnya wilayah Minahasa dan Tomohon yang memiliki tradisi komunalitas dan sistem kekerabatan yang kuat, pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor kultural ini berinteraksi dengan praktik politik dan ekonomi menjadi sangat penting namun masih terabaikan dalam literatur.

Kesenjangan lain yang perlu diisi adalah terkait dengan dampak hubungan penguasa-pengusaha terhadap kualitas demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengidentifikasi fenomena oligarki dan patron-klien sebagai masalah, namun kurang mengeksplorasi bagaimana masyarakat desa sebagai subyek politik merespons, menegosiasikan, atau bahkan melawan dominasi elit tersebut. Perspektif agensi masyarakat dalam menghadapi struktur kekuasaan yang tidak seimbang ini perlu mendapat perhatian lebih untuk memahami secara utuh dinamika demokrasi di tingkat grass-root. Selain itu, belum ada studi komparatif yang sistematis antara desa dan kelurahan dalam konteks hubungan penguasa-pengusaha, padahal kedua entitas ini memiliki karakteristik pemerintahan dan masyarakat yang berbeda yang dapat mempengaruhi pola hubungan kekuasaan. Penelitian di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara akan mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan analisis komparatif yang dapat menunjukkan variasi pola hubungan penguasa-pengusaha

berdasarkan perbedaan struktur pemerintahan dan karakteristik masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal pendekatan metodologis dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi politik dan studi demokrasi dalam menganalisis hubungan penguasa dan pengusaha di tingkat desa dan kelurahan. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung menggunakan satu perspektif teoritis, penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-perspektif yang menggabungkan analisis struktural tentang distribusi kekuasaan dengan analisis kultural tentang nilai, norma, dan praktik sosial yang melegitimasi hubungan tersebut. Kerangka analisis ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hubungan penguasa-pengusaha tidak hanya dibentuk oleh kepentingan ekonomi-politik semata, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang berakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengeksplorasi dimensi agensi masyarakat dalam merespons dominasi elit, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur, sehingga dapat memberikan wawasan baru tentang potensi transformasi demokratis dari dalam masyarakat itu sendiri.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah fokusnya pada studi komparatif antara desa dan kelurahan di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki konteks sosial-budaya yang khas. Pemilihan Desa Lompad dan Kelurahan Taratara sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi variasi pola hubungan penguasa-pengusaha berdasarkan perbedaan struktur pemerintahan, karakteristik demografis, dan dinamika ekonomi lokal. Studi komparatif ini dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan nuansa tentang bagaimana konteks lokal membentuk konfigurasi kekuasaan yang berbeda-beda, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori tentang politik lokal di Indonesia dengan menyediakan data empiris dari wilayah yang selama ini relatif kurang terwakili dalam literatur sosiologi politik dan studi demokrasi, sehingga memperkaya pemahaman kita tentang keragaman praktik politik di berbagai daerah di Indonesia.

Di Desa Lompad, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kelurahan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat, terdapat indikasi kuat tentang hubungan erat antara penguasa lokal dengan pengusaha yang beroperasi di wilayah tersebut. Pengamatan awal menunjukkan bahwa sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan program ekonomi di kedua lokasi ini cenderung dikuasai oleh kelompok pengusaha tertentu yang memiliki kedekatan personal dengan kepala desa, kepala kelurahan, dan elite birokrasi lokal lainnya. Dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran desa dan program pembangunan, suara masyarakat luas seringkali terpinggirkan karena keputusan sudah dibuat dalam forum-forum informal yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Fenomena ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan, di mana kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan mendapat keuntungan lebih besar sementara masyarakat biasa hanya menjadi penonton atau penerima manfaat yang minimal, mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan partisipasi demokratis dalam tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

Lebih jauh, pola hubungan penguasa-pengusaha ini juga mempengaruhi dinamika politik elektoral di kedua wilayah tersebut. Pengusaha lokal seringkali menjadi penyandang dana utama dalam pemilihan kepala desa atau calon kepala kelurahan, dengan harapan akan mendapatkan kemudahan akses terhadap sumber daya dan kebijakan yang menguntungkan jika kandidat yang mereka dukung terpilih. Praktik politik transaksional semacam ini tidak hanya merusak kompetisi politik yang sehat, tetapi juga menciptakan ketergantungan penguasa terhadap pengusaha yang pada akhirnya mempengaruhi independensi dan akuntabilitas pemerintahan desa dan kelurahan. Masyarakat di kedua lokasi ini juga menunjukkan sikap yang ambivalen terhadap fenomena ini, di satu sisi mereka menyadari adanya praktik yang tidak adil,

namun di sisi lain mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan karena keterbatasan akses terhadap informasi, modal sosial yang terfragmentasi, dan ketergantungan ekonomi terhadap elite lokal. Realitas ini menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam tentang mekanisme hubungan penguasa-pengusaha dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal, serta untuk mengeksplorasi potensi-potensi transformatif yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam untuk mengeksplorasi hubungan penguasa dan pengusaha dalam konteks sosiologi politik dan demokrasi di Desa Lompad, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kelurahan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif dan pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam relasi kekuasaan tersebut (Creswell, 2014). Metode ini sangat tepat untuk mengungkap makna, motivasi, dan dinamika hubungan yang kompleks antara elit politik dan ekonomi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi tema-tema yang muncul secara alami dari data lapangan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan mendalam tentang praktik-praktik kekuasaan di tingkat lokal (Denzin & Lincoln, 2011).

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi-terstruktur dengan narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait hubungan penguasa dan pengusaha di lokasi penelitian. Wawancara mendalam dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara detail dan memperoleh perspektif yang kaya dari para informan tentang fenomena yang diteliti (Kvale & Brinkmann, 2009). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang yang dipilih secara purposif berdasarkan posisi dan pengalaman mereka dalam struktur sosial-politik lokal, yaitu Bapak FC Pangemanan sebagai mantan Hukum Tua Desa Lompad, Bapak RML sebagai tokoh masyarakat yang memahami dinamika politik lokal, dan Ibu YR sebagai pengusaha yang juga terlibat dalam aktivitas politik. Pemilihan narasumber dengan latar belakang yang beragam ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang hubungan penguasa-pengusaha dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi pemerintahan, masyarakat, maupun pelaku ekonomi.

Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas, sementara peneliti tetap dapat mengarahkan pembahasan pada fokus penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan secara iteratif, dimulai dengan transkripsi verbatim dari rekaman wawancara, pengkodean data untuk mengidentifikasi unit-unit makna, pengelompokan kode-kode ke dalam tema-tema yang lebih luas, dan interpretasi tema-tema tersebut dalam kerangka teoritis sosiologi politik dan demokrasi. Untuk menjaga kredibilitas dan validitas temuan, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan melakukan member checking untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh narasumber. Pendekatan analitis ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap tidak hanya pola-pola hubungan penguasa-pengusaha yang tampak di permukaan, tetapi juga logika dan rasionalitas yang mendasari praktik-praktik tersebut dalam konteks sosial-budaya dan politik lokal.

C. Results and Discussion

1. Result

a. Modal Ekonomi sebagai Prasyarat Kekuasaan Politik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal ekonomi merupakan prasyarat fundamental bagi seseorang untuk memasuki dan bertahan dalam arena politik lokal di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak FC Pangemanan, mantan Hukum Tua Desa Lompad, terungkap bahwa,

”...pengusaha dan penguasa politik memiliki hubungan yang sangat erat karena untuk terjun ke dunia politik seseorang harus memiliki modal finansial yang memadai. Modal ini digunakan untuk mendanai berbagai aktivitas kampanye seperti pertemuan dengan konstituen, distribusi bantuan material, pengorganisasian acara-acara politik, dan mobilisasi massa pemilih. Tanpa dukungan finansial yang kuat, calon pemimpin lokal akan kesulitan untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala desa atau pemilihan lainnya, mengingat ekspektasi masyarakat terhadap kandidat yang mampu memberikan "bukti nyata" kepedulian mereka melalui distribusi material selama masa kampanye”.

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak FC



Sumber: Data Primer

Fenomena ketergantungan pada modal ekonomi ini mencerminkan praktik politik transaksional yang telah mengakar dalam sistem demokrasi lokal. Para kandidat yang memiliki usaha sendiri atau mendapat dukungan dari pengusaha lain memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan dengan kandidat yang hanya mengandalkan visi dan program tanpa dukungan finansial memadai. Hal ini mengakibatkan terjadinya seleksi alam dalam politik lokal, di mana hanya mereka yang memiliki atau mendapat akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat maju dan bersaing dalam kontestasi politik. Kondisi ini pada gilirannya mempersempit ruang bagi munculnya pemimpin-pemimpin alternatif yang mungkin memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas yang baik namun tidak memiliki modal ekonomi yang cukup, sehingga perpetuasi elite ekonomi dalam struktur kekuasaan politik terus berlangsung.

Implikasi dari temuan ini terhadap kualitas demokrasi lokal sangat serius, karena politik menjadi arena yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki privilese ekonomi. Ketika modal finansial menjadi determinan utama kesuksesan politik, maka prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan kesempatan, merit system, dan representasi yang inklusif menjadi terdistorsi. Masyarakat pemilih juga turut berkontribusi dalam melanggengkan sistem ini melalui ekspektasi mereka terhadap kandidat yang dapat memberikan bantuan material, yang pada dasarnya merupakan hasil dari kondisi ekonomi yang sulit dan minimnya jaminan sosial dari negara. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan dan keterbatasan ekonomi

masyarakat membuat mereka rentan terhadap politik uang, sementara politik uang itu sendiri memastikan bahwa hanya elite ekonomi yang dapat berkuasa dan mengontrol sumber daya untuk kepentingan kelompok mereka, bukan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

b. Hubungan Simbiosis Mutualisme antara Penguasa dan Pengusaha

Penelitian ini mengungkap adanya hubungan simbiosis mutualisme yang kuat antara penguasa politik dan pengusaha di tingkat lokal, di mana kedua pihak saling membutuhkan dan mendapatkan keuntungan dari relasi tersebut. Menurut Bapak RML,

”...hubungan pengusaha dan penguasa politik sangat erat karena keduanya mendapatkan keuntungan yang saling menguntungkan, yaitu politisi mendapatkan dana untuk membiayai partai dan aktivitas politik mereka, sementara pengusaha memperoleh kesempatan untuk memperluas bisnis mereka melalui akses istimewa terhadap kebijakan, proyek pemerintah, dan perlindungan dari persaingan. Pola hubungan ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi tidak terpisah, melainkan saling bertautan dalam jaringan patron-klien yang menguntungkan elite namun merugikan kepentingan publik yang lebih luas”.

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak RML



Sumber: Data Primer

Dalam praktiknya, simbiosis ini terwujud dalam berbagai bentuk pertukaran kepentingan yang seringkali tidak transparan dan tidak akuntabel. Pengusaha yang telah memberikan dukungan finansial kepada kandidat yang kemudian terpilih akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk kemudahan perizinan usaha, akses terhadap proyek-proyek pemerintah desa atau kelurahan, atau kebijakan yang melindungi bisnis mereka dari kompetitor. Sebaliknya, penguasa politik yang telah menerima dukungan dari pengusaha merasa berkewajiban untuk membalas budi tersebut, sehingga keputusan-keputusan politik dan kebijakan publik tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat luas melainkan pada kepentingan kelompok elite yang telah saling mendukung. Kondisi ini menciptakan sistem oligarki lokal di mana sumber daya publik dikontrol dan didistribusikan oleh sekelompok kecil elite untuk kepentingan mereka sendiri, sementara mekanisme check and balance dan partisipasi masyarakat menjadi lemah.

Hubungan simbiosis mutualisme ini juga berdampak pada berkurangnya independensi dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Ketika penguasa politik memiliki hutang budi kepada pengusaha yang telah mendanai kampanye mereka, maka ruang bagi mereka untuk membuat keputusan yang objektif dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi terbatas. Pengusaha yang telah menginvestasikan dana yang besar untuk mendukung kandidat tertentu tentu mengharapkan return of investment yang sepadan, yang seringkali berbentuk privilese ekonomi yang merugikan kompetisi pasar yang sehat dan merugikan masyarakat konsumen. Lebih jauh,

hubungan yang terbangun ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, karena baik penguasa maupun pengusaha memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka. Hal ini mengakibatkan terjadinya reproduksi elite dan perpetuasi ketimpangan kekuasaan yang menghambat demokratisasi dan pembangunan yang inklusif di tingkat lokal.

c. Politik sebagai Strategi Perluasan Bisnis dan Akumulasi Modal Simbolik

Temuan penting lainnya dari penelitian ini adalah bahwa bagi sebagian pengusaha, keterlibatan dalam politik bukan hanya untuk mendapatkan akses terhadap kebijakan dan sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas jaringan bisnis dan mengakumulasi modal simbolik yang dapat meningkatkan reputasi dan legitimasi usaha mereka. Ibu YR menjelaskan bahwa,

”...pengusaha dan penguasa politik memiliki hubungan yang erat karena mereka sudah memiliki modal finansial yang menjadi dasar untuk maju dalam politik, dan setelah terpilih, bisnis yang mereka jalankan akan lebih dikenal lagi di pasaran dengan menyandang status sebagai anggota parlemen atau pejabat pemerintahan. Status politik ini memberikan kredibilitas dan kepercayaan tambahan dari masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan, sehingga dapat meningkatkan omzet dan memperluas pangsa pasar”.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu YR



Sumber: Data Primer

Fenomena ini menunjukkan bahwa politik lokal tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan untuk mengontrol sumber daya material, tetapi juga untuk mengakumulasi modal simbolik dalam bentuk prestise, status sosial, dan reputasi yang dapat dikonversi menjadi keuntungan ekonomi. Ketika seorang pengusaha menjadi kepala desa, anggota DPRD, atau pejabat lainnya, bisnis yang mereka miliki secara otomatis mendapatkan publisitas gratis dan endorsement tidak langsung dari posisi politik mereka. Masyarakat cenderung lebih percaya dan memilih untuk berbisnis dengan pengusaha yang memiliki jabatan politik karena mereka dianggap memiliki koneksi, kapabilitas, dan kredibilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, investasi dalam politik tidak hanya menghasilkan kekuasaan politik dan akses terhadap kebijakan, tetapi juga return dalam bentuk ekspansi bisnis dan peningkatan profit yang dapat melebihi investasi awal yang dikeluarkan untuk kampanye.

Strategi menggunakan politik sebagai alat perluasan bisnis ini juga mencerminkan logika kapitalisme yang telah merasuki semua sfera kehidupan, termasuk politik yang seharusnya menjadi ruang untuk pelayanan publik dan perjuangan kepentingan bersama. Politik menjadi

terkomodifikasi dan diperlakukan sebagai investasi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan, bukan sebagai pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya privatisasi kepentingan publik, di mana sumber daya dan kebijakan publik diarahkan untuk mendukung kepentingan bisnis elite politik-ekonomi. Lebih jauh, ketika pengusaha yang menjadi penguasa politik lebih fokus pada bagaimana posisi politik mereka dapat menguntungkan bisnis pribadi, maka fungsi pemerintahan sebagai penyedia layanan publik dan pelindung kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Masyarakat yang seharusnya menjadi subyek dan penerima manfaat dari pemerintahan malah menjadi objek eksploitasi dalam logika akumulasi modal yang dijalankan oleh elite politik-ekonomi lokal. Kondisi ini memperlihatkan degradasi nilai-nilai demokrasi dan melemahnya orientasi pada kepentingan publik dalam tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan.

d. Pembahasan

a. Modal Ekonomi sebagai Prasyarat Kekuasaan Politik

Temuan penelitian tentang pentingnya modal ekonomi sebagai prasyarat untuk memasuki arena politik lokal dapat dipahami melalui konsep modal (capital) yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1986). Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dapat diakumulasi dan dikonversi menjadi bentuk modal lainnya, termasuk modal politik yang memberikan akses terhadap kekuasaan dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik. Dalam konteks Desa Lompad dan Kelurahan Taratara, para calon pemimpin lokal yang memiliki modal ekonomi memadai dapat mengkonversi kekayaan mereka menjadi modal simbolik dan modal sosial melalui praktik-praktik kampanye yang melibatkan distribusi material kepada pemilih. Hal ini sejalan dengan argumen Aspinall dan Berenschot (2019) yang menunjukkan bahwa dalam demokrasi elektoral Indonesia, money politics telah menjadi strategi dominan yang memerlukan akumulasi modal ekonomi yang besar untuk dapat bersaing secara efektif dalam kontestasi politik.

Ketergantungan pada modal ekonomi dalam politik lokal juga mencerminkan apa yang disebut Winters (2011) sebagai oligarki material, yaitu sistem kekuasaan yang didasarkan pada konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite yang menggunakan sumber daya ekonomi mereka untuk mempertahankan dan memperluas dominasi politik. Dalam sistem oligarki, akses terhadap kekuasaan politik tidak ditentukan oleh kompetensi, visi, atau dukungan ideologis dari masyarakat, melainkan oleh kemampuan finansial untuk membiayai kampanye dan memobilisasi pemilih melalui mekanisme transaksional. Robison dan Hadiz (2004) juga menunjukkan bahwa pasca-reformasi di Indonesia, meskipun terjadi demokratisasi formal, struktur oligarki justru semakin mengakar di tingkat lokal karena desentralisasi memberikan ruang bagi elite lokal untuk menguasai sumber daya dan kekuasaan tanpa kontrol yang memadai dari institusi demokratis. Di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara, fenomena ini terlihat jelas di mana calon pemimpin yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat akan sulit untuk berkompetisi, terlepas dari kualitas kepemimpinan dan program yang mereka tawarkan.

Implikasi dari dominasi modal ekonomi dalam politik lokal terhadap kualitas demokrasi sangat signifikan, karena hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental demokrasi yang menekankan kesetaraan politik dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik (Dahl, 1989). Ketika modal ekonomi menjadi barrier to entry yang tinggi dalam arena politik, maka demokrasi hanya menjadi permainan elite yang memiliki privilese ekonomi, sementara masyarakat luas tereksklusi dari proses pengambilan keputusan. Nordholt dan van Klinken (2007) mengemukakan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai "local strongmen" yang menguasai

politik dan ekonomi lokal melalui kombinasi kekayaan, kekerasan, dan koneksi dengan birokrasi. Dalam konteks ini, pemilih yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit menjadi sangat rentan terhadap politik uang karena mereka melihat pemilihan sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan material jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pemilihan pemimpin yang tidak akuntabel. Situasi ini menciptakan apa yang disebut Kitschelt dan Wilkinson (2007) sebagai "clientelistic accountability", yaitu bentuk akuntabilitas yang didasarkan pada pertukaran material jangka pendek antara politisi dan pemilih, bukan pada kinerja kebijakan dan kepentingan publik jangka panjang.

b. Hubungan Simbiosis Mutualisme antara Penguasa dan Pengusaha

Hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha yang terungkap dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori patron-klien yang telah lama menjadi karakteristik sistem politik di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Scott (1972) menjelaskan bahwa hubungan patron-klien adalah relasi pertukaran yang bersifat personal dan resiprokal antara pihak yang memiliki status, kekayaan, dan pengaruh yang tidak setara, di mana patron memberikan perlindungan dan sumber daya kepada klien, sementara klien memberikan dukungan politik dan loyalitas kepada patron. Dalam konteks penelitian ini, pengusaha berperan sebagai patron yang menyediakan sumber daya finansial untuk kampanye politik, sementara penguasa yang terpilih berperan sebagai klien yang memberikan akses istimewa terhadap kebijakan, proyek, dan perlindungan bisnis. Meskipun secara formal penguasa memiliki otoritas politik yang lebih tinggi, dalam praktiknya mereka bergantung pada dukungan finansial pengusaha, sehingga tercipta relasi ketergantungan mutual yang menguntungkan kedua belah pihak namun merugikan kepentingan publik yang lebih luas.

Hadiz (2010) dalam analisisnya tentang localising power di Indonesia pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa jaringan predatori antara politisi, birokrat, dan pengusaha telah berhasil beradaptasi dengan sistem demokratis formal sambil tetap mempertahankan praktik-praktik kolusif yang merugikan kepentingan publik. Desentralisasi yang seharusnya membawa pemerintahan lebih dekat dengan rakyat justru menciptakan arena bagi elite lokal untuk membangun oligarki yang lebih kuat karena lemahnya mekanisme check and balance dan minimnya partisipasi masyarakat sipil yang efektif. Vedi Hadiz dan Richard Robison (2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga politis, di mana elite ekonomi menggunakan kekuasaan politik untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka, sementara elite politik memanfaatkan posisi kekuasaan untuk akumulasi kekayaan. Di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara, pola ini terlihat dalam bagaimana pengusaha yang mendanai kampanye kemudian mendapatkan proyek-proyek pemerintah dan kemudahan perizinan, sementara penguasa menggunakan kekuasaan mereka untuk memfasilitasi kepentingan bisnis para pendukung finansial mereka.

Hubungan simbiosis mutualisme ini juga berdampak pada melemahnya akuntabilitas demokratis dan transparansi pemerintahan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh O'Donnell (1998) dalam konsepnya tentang "horizontal accountability" yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol antar-institusi dalam sistem demokratis. Ketika penguasa memiliki hutang politik kepada pengusaha, maka independensi mereka dalam membuat keputusan kebijakan menjadi terkompromikan, dan kepentingan publik terabaikan demi memenuhi kepentingan para patron ekonomi mereka. Antlöv, Wetterberg, dan Dharmawan (2016) dalam penelitian mereka tentang implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia menemukan bahwa meskipun regulasi memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada desa, dalam praktiknya seringkali terjadi elite capture di mana segelintir elite lokal menguasai pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya untuk kepentingan kelompok mereka. Temuan penelitian

di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara mengkonfirmasi pola ini, di mana keputusan-keputusan penting terkait pembangunan dan alokasi anggaran dibuat dalam forum-forum informal yang melibatkan elite politik-ekonomi, tanpa partisipasi yang bermakna dari masyarakat luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokratisasi formal belum diikuti oleh demokratisasi substansial yang menjamin partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan lokal.

c. Politik sebagai Strategi Perluasan Bisnis dan Akumulasi Modal Simbolik

Fenomena penggunaan politik sebagai strategi perluasan bisnis dan akumulasi modal simbolik yang ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan apa yang disebut oleh Bourdieu (1986) sebagai konversi modal, yaitu proses transformasi satu bentuk modal menjadi bentuk modal lainnya untuk memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan dominasi sosial. Dalam kasus ini, pengusaha mengkonversi modal ekonomi mereka menjadi modal politik melalui keterlibatan dalam pemilihan dan jabatan pemerintahan, yang kemudian dikonversi kembali menjadi modal simbolik berupa prestise dan reputasi yang meningkatkan kredibilitas bisnis mereka. Modal simbolik ini, menurut Bourdieu, memiliki nilai ekonomi riil karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jaringan bisnis, dan membuka akses terhadap pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam konteks masyarakat desa dan kelurahan di Indonesia yang masih kental dengan kultur paternalistik dan penghormatan terhadap figur otoritas, status politik memberikan legitimasi sosial yang kuat yang dapat dikapitalisasi untuk keuntungan ekonomi.

Komodifikasi politik ini mencerminkan penetrasi logika kapitalisme ke dalam semua aspek kehidupan sosial, termasuk politik yang seharusnya menjadi ruang untuk deliberasi kepentingan publik dan perjuangan untuk keadilan sosial. Habermas (1989) dalam teorinya tentang kolonisasi lifeworld menjelaskan bagaimana logika sistem, khususnya ekonomi dan administrasi negara, telah mengkolonisasi dunia kehidupan (lifeworld) yang seharusnya diatur oleh komunikasi dan solidaritas sosial. Ketika politik diperlakukan sebagai investasi bisnis yang harus menghasilkan return yang terukur, maka nilai-nilai intrinsik politik seperti pelayanan publik, representasi kepentingan rakyat, dan perjuangan untuk kesejahteraan bersama menjadi terdistorsi dan tergantikan oleh kalkulasi untung-rugi ekonomi. Crouch (2004) mengemukakan konsep "post-democracy" untuk menggambarkan situasi di mana institusi-institusi demokratis formal masih berfungsi, namun kekuasaan riil berada di tangan elite ekonomi yang menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi kebijakan demi kepentingan bisnis mereka, bukan kepentingan mayoritas rakyat.

Dalam konteks Indonesia, komodifikasi politik dan privatisasi kepentingan publik telah menjadi keprihatinan serius bagi konsolidasi demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian tentang politik lokal pasca-desentralisasi. Vel dan Bedner (2015) menemukan bahwa dana desa yang seharusnya menjadi instrumen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seringkali digunakan untuk kepentingan elite lokal yang memiliki koneksi dengan pemerintahan desa. Törnquist, Webster, dan Stokke (2009) juga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami demokratisasi yang signifikan sejak reformasi, kualitas demokrasi di tingkat lokal masih lemah karena dominasi elite dan minimnya ruang bagi partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban penguasa, maka demokrasi lokal akan terus didominasi oleh elite politik-ekonomi yang menggunakan kekuasaan publik untuk akumulasi kekayaan pribadi. Fenomena di Desa Lompad dan Kelurahan Taratara menunjukkan urgensi untuk mereformasi tata kelola pemerintahan lokal dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta

membangun kesadaran kritis masyarakat tentang hak-hak politik mereka dan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan berdasarkan kemampuan distribusi material jangka pendek.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa hubungan antara penguasa dan pengusaha di Desa Lompad, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kelurahan Taratara, Kecamatan Tomohon Barat bersifat simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan namun merugikan kepentingan publik dan melemahkan kualitas demokrasi lokal. Modal ekonomi terbukti menjadi prasyarat fundamental untuk memasuki arena politik, di mana para calon pemimpin lokal memerlukan dukungan finansial yang besar untuk membiayai kampanye dan memobilisasi pemilih melalui mekanisme transaksional. Hubungan patron-klien antara pengusaha sebagai penyandang dana dan penguasa sebagai pemberi akses istimewa terhadap kebijakan dan proyek pemerintah telah menciptakan oligarki lokal yang mengkonsentrasikan kekuasaan politik dan ekonomi di tangan segelintir elite. Lebih jauh, keterlibatan pengusaha dalam politik tidak hanya untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya publik, tetapi juga sebagai strategi bisnis untuk mengakumulasi modal simbolik yang dapat meningkatkan kredibilitas dan memperluas pasar usaha mereka. Fenomena ini mencerminkan komodifikasi politik dan privatisasi kepentingan publik, di mana logika kapitalis telah mengkolonisasi ruang politik yang seharusnya menjadi arena untuk pelayanan publik dan perjuangan kesejahteraan bersama.

Implikasi dari temuan penelitian ini terhadap demokrasi lokal sangat serius, karena praktik-praktik yang teridentifikasi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi seperti kesetaraan politik, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi inklusif. Dominasi modal ekonomi dalam politik menciptakan barrier to entry yang tinggi bagi calon pemimpin alternatif yang mungkin memiliki integritas dan kapasitas tetapi tidak memiliki sumber daya finansial memadai, sehingga perpetuasi elite terus berlangsung. Hubungan simbiosis antara penguasa dan pengusaha mengakibatkan keputusan-keputusan publik dibuat berdasarkan kepentingan kelompok elite, bukan berdasarkan kepentingan masyarakat luas, yang pada gilirannya melemahkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan lokal. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan regulasi tentang pendanaan kampanye, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap elite, dan pendidikan politik untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang hak-hak demokratis mereka. Hanya dengan transformasi struktural dan kultural yang komprehensif, demokrasi lokal dapat berfungsi sebagai instrumen untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebagai alat akumulasi kekayaan dan kekuasaan bagi segelintir elite politik-ekonomi.

Daftar Pustaka

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Crouch, C. (2004). *Post-Democracy*. Polity Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35-57.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge University Press.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Lukes, S. (2005). *Power: A Radical View* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Nordholt, H. S., & van Klinken, G. (2007). *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. KITLV Press.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91-113.
- Törnquist, O., Webster, N., & Stokke, K. (2009). *Rethinking Popular Representation*. Palgrave Macmillan.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.